

**ANALYSIS OF ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE
OF REGIONAL DEVICES IN BOGOR CITY (CASE STUDY IN P
SATPOL PP DEPARTMENT, BOGOR CITY)**

Wina Liana Rosni¹, Denny Hernawan², Ginung Pratidina³

¹ Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,
Djuanda University, Jl Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16770.

²The Department of Public Administration, Faculty of Social and Political
Sciences, Djuanda University, Jl Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16770.

³ Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,
Djuanda University, Jl Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16770.

* correspondence: Wina Liana Rosni. Mobile: 082211180759

Wina.liana.r@unida.ac.id

ABSTRACT

Wina Liana Rosni, Public Administration Study Program. Faculty of Social and Political Sciences, 2019. Analysis of the Performance Evaluation of Regional Devices in the City of Bogor (Case Study at the Bogor City Satpol PP Office).

The purpose of this study is to find out the performance of regional organizations in Bogor City (Case Study in the Bogor City Satpol PP Office). The theory used in this study is organizational performance theory according to Agus Dwiyanto (2008: 49), in which there are 5 dimensions, namely: productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. This research uses descriptive analysis method using a quantitative approach. For data analysis techniques using WMS calculation (Wight Mean Score). While for data collection techniques, namely using library research and field studies (observation, interviews, questionnaires). The respondents were 75 employees of the Bogor City Satpol PP Office.

Based on the results of the study show that the dimensions of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability obtain an average of 3.14 which is included in the criteria of good. Even though the results of the study received good ratings, but in reality, there are still obstacles in carrying out their duties. Where human resources are still inadequate. Because in carrying out the task of maintaining order, security and tranquility in the area of Bogor City it cannot be handled by a small number of employees, so that this will affect the results of the achievement of organizational performance in the Bogor City Satpol PP Office.

Keywords: Organizational performance, human resources, regional equipment

**ANALISIS PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI KOTA BOGOR (STUDI KASUS PADA DINAS SATPOL PP
KOTA BOGOR)**

Wina Liana Rosni¹, Denny Hernawan², Ginung Pratidina³

¹Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16770.

²Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16770.

³Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16770.

*korespondensi : Wina Liana Rosni. HP : 082211180759

Wina.liana.r@unida.ac.id

ABSTRAK

Wina Liana Rosni, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019. Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Studi Kasus Pada Dinas Satpol PP Kota Bogor).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja organisasi perangkat daerah di kota bogor (Studi Kasus di Dinas Satpol PP Kota Bogor). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto (2008:49), yang didalamnya terdapat 5 dimensi yaitu : produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk teknik analisis data menggunakan perhitungan WMS (*Wight Mean Score*). Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, angket). Yang menjadi responden adalah pegawai Dinas Satpol PP Kota Bogor sebanyak 75 orang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas memperoleh hasil rata-rata sebesar **3.14** yang termasuk dalam kriteria **baik**. Walaupun hasil penelitian mendapat penilaian baik, tapi pada kenyataannya, masih terdapat hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Dimana sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang memadai. Karena dalam melaksanakan tugas untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman di wilayah Kota Bogor tidak dapat ditangani oleh jumlah pegawai yang sedikit, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari capaian kinerja organisasi di Dinas Satpol PP Kota Bogor.

Kata kunci : Kinerja organisasi, Sumber daya manusia, Perangkat daerah.

PENDAHULUAN

Persaingan di era globalisasi saat ini, organisasi dituntut harus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Karena persaingan organisasi yang semakin ketat, maka dari itu organisasi harus mampu menjaga kelangsungan hidup organisasi.

Organisasi harus mempunyai kinerja yang prima dalam menghadapi berbagai situasi. Mengingat situasi yang terjadi dilingkungan saat ini semakin kompleks dari masa ke masa dan dituntut untuk bisa memuaskan kepentingan *stakeholder* yang berbeda-beda.

Kinerja organisasi merupakan salah satu cerminan dari keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana teralisasinya program kegiatan yang ada di organisasi atau instansi tersebut. Sehingga diperoleh informasi yang dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menilai kinerja organisasi apakah sudah sejalan dengan yang ditetapkan atau belum.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pedoman Evaluasi untuk mengukur keberhasilan suatu program kegiatan. Jadi, sebagai penyelenggara pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap proses kerja yang

terrealisasi apakah sudah atau belum dalam mencapai target yang dituangkan ke dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

Mengacu pada paparan diatas Satpol PP Kota Bogor sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah, dalam hal ini Kinerja Dinas Satpol PP Kota Bogor dalam melaksanakan tugasnya masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Capaian Kinerja Dinas
Satpol PP Kota Bogor
Tahun 2018

| No | Program Kegiatan | Target | Hasil Capaian |
|----|---|----------|---------------|
| 1 | Penegakan Perda KTR | 78% | 91% |
| 2 | Bangunan melanggar yang ditertibkan | 96% | 81% |
| 3 | Penertiban PKL | 40 titik | 38 titik |
| 4 | Waktu tanggap darurat (kasus kebakaran) | 90% | 87% |
| 5 | Meningkatkan kompetensi pegawai | 50 orang | 50 orang |
| 6 | Peningkatan sarana dan prasaran | 55 unit | 27 unit |

Sumber : *LAKIP Satpol PP Kota Bogor, 2019*

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa Secara Keseluruhan Kegiatan Satpol PP Kota Bogor tahun 2018 di semua bidang sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan TUPOKSI masing-masing bidang serta mendukung capaian kinerja yang di tuangkan dalam RPJMD kota Bogor serta RENSTRA dan RENJA yang ada di Dinas Satpol PP Kota Bogor Tahun 2018. Walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target realisasi program, seperti kegiatan bangunan yang ditertibkan harusnya targetnya mencapai 96%. Sedangkan pada realisasinya hanya mencapai 86%. Hal ini disebabkan karena Pembongkaran Bangunan terlaksana tidak sesuai dengan target. Karena pembongkaran bersifat insidental yaitu pelaksanaannya dilakukan sewaktu-waktu, pembongkaran merupakan langkah terakhir yg dilakukan apabila pemilik bangunan tidak mengindahkan tiap-tiap tahapan perizinan dan pendirian bangunan. Selain itu pembongkaran bisa dari laporan warga/masyarakat terkait bangunan yang dapat membahayakan keselamatan warga dan pembongkaran bisa juga limbah dari Dinas terkait sesuai prosedur yang berlaku.

Kegiatan jumlah kawasan PKL yang berhasil ditertibkan dari target yang harusnya dicapai adalah 40 titik, tetapi pada realisasinya hanya berhasil menertibkan 38 titik saja, hal ini terjadi karena tidak adanya pemeliharaan pasca penertiban, relokasi dan komitmen yang kuat dengan instansi lainnya, serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya fasilitas umum seperti Ruang Terbuka Hijau, Trotoar,

Taman, saluran, emperan toko dari para PKL. Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah, karena banyaknya PKL yang dibekingi oleh oknum aparat tertentu, dan tidak adanya pemeliharaan dan pembinaan yang spesifik pasca penertiban, serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya fasilitas umum seperti Ruang Terbuka Hijau, Trotoar, Taman, saluran, emperan toko.

Kegiatan Damkar mengenai tanggapan darurat dalam menangani kasus kebakaran yang ditargetkan 90% hasil capainnya masih dikisaran 87%. Hal ini terjadi karena kasus kebakaran yang dapat ditangani dalam waktu tanggap/respons time sisanya belum tertangani dalam waktu tanggap faktor lokasi yang cukup jauh.

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana operasional yang ditargetkan akan bertambah menjadi 55 Unit tetapi yang terealisasi hanya 27 Unit. Keterbatasan sarana operasional juga menjadi kendala teknis pelaksanaan tugas manakala kesiapan, kecekatan dan kecepatan (kesigapan) Satpol PP Kota Bogor dituntut untuk optimal dalam mengatasi dan atau mengantisipasi permasalahan sosial masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Bahkan keterbatasan sarana operasional juga dapat menimbulkan perlindungan anggota yang tidak maksimal dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu yang memerlukan peralatan pengamanan / sarana yang lengkap.

Dari uraian capaian kinerja kegiatan di Dinas Satpol PP Kota Bogor dari berbagai fakta dan data yang ada dilapangan dapat diketahui bahwa visi dan misi Satpol PP Kota

Bogor belum tercapai sepenuhnya karena dalam menjalankan tugasnya belum mampu menghasilkan kinerja yang maksimal terlebih dengan beberapa capaian kinerja yang masih kurang dari yang ditargetkan.

Oleh sebab itu perlunya upaya perbaikan dari Satpol PP Kota Bogor dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil capaian kinerja yang akan diperoleh nantinya.

MATERI DAN METODE

Fokus dari penelitian ini terdapat pada kinerja organisasi. Kinerja organisasi menjadi cerminan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Untuk mengetahui tentang kinerja organisasi, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008:49), dengan dimensi sebagai berikut :

1. Produktivitas, dimensi ini digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektifitas. Jadi produktivitas digunakan untuk memahami rasio antara input dan output.
2. Kualitas Layanan, seringkali dimensi ini mendapat pandangan kurang baik dimana muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas dari organisasi tersebut.
3. Responsivitas, dimensi ini digunakan untuk mengenali kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, menyusun agenda prioritas layanan dan mengembangkan program pelayanan public. Hal ini menjadi

salah satu ukuran kinerja, sebab dimensi ini secara langsung mendeskripsikan kompetensi birokrasi dalam menjalankan visi dan tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Responsibilitas, dimensi ini mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur administrasi yang baik dan benar.
5. Akuntabilitas, dimensi ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kegiatan dan kebijakannya tunduk pada pejabat politik yang dipilih masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi tindak lanjut dari keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13), metode penelitian kuantitatif adalah : “metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2013:11) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis yaitu

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang lain.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satpol PP Kota Bogor sebanyak 306 orang.

Menurut Sugiyono (2013:18) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Adapun untuk menentukan sampel pegawai Satpol PP Kota Bogor peneliti menggunakan Teknik sampling, dimana dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik sensus sampling, dimana semua populasi dijadikan sampel. Sehingga dari 306 pegawai Satpol PP Kota Bogor, yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 75 orang responden yang diambil dari setiap bidang yang ada di Dinas Satpol PP Kota Bogor.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Peneliti dalam melaksanakan penelitian membutuhkan data yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Adapun beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan informasi dari kelengkapan data yang diperoleh oleh peneliti, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang sifatnya teoritis yang berhubungan dengan bidang yang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik melakukan penelitian langsung di lapangan pada objek yang akan diteliti dengan cara :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Angket (Kuesioner)

TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut Bakrie Siregar (1982:20) perhitungan data yang diperoleh dari lapangan lalu diolah berdasarkan jawaban melalui angket yang menggunakan rumus *Weight Means Score* (WMS). *Weight Means Score* (WMS) digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kecenderungan rata-rata dari masing-masing variabel penelitian. Perhitungan WMS dilakukan untuk mengetahui kedudukan setiap indikator atau item.

Adapun Rumus *Weight Means Score*(WMS)

$$M = \frac{\sum(fx)}{n}$$

Keterangan :

- M = Perolehan angka criteria penafsiran
- f = Frekuensi Jawaban
- x = Pembobotan (skala nilai)
- \sum = Penjumlahan
- n = Jumlah seluruh jawaban responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bogor (Studi Kasus Pada Dinas Satpol PP Kota Bogor), berikut peneliti uraikan hasil dari jawaban-jawaban responden dari beberapa indikator yang tertuang dalam angket (kuesioner) yang disebar ke 75 orang

responden yang ada di Dinas Satpol PP Kota Bogor.

Analisis Penilaian Kinerja Organisasi mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, dengan dimensi sebagai berikut :

1. Produktivitas;
2. Kualitas Layanan;
3. Responsivitas;
4. Responsibilitas; dan
5. Akuntabilitas

Tabel 2
Rekapitulasi Jawaban Responden
Tentang Dimensi Produktivitas

| Dimensi | Indikator | M | Hasil Penafsiran |
|-------------------------|--|-------------|------------------|
| Produktivitas | Sumber Daya Manusia yang terlibat | 3.8 | Baik |
| | Sarana dan Prasarana | 4.14 | Baik |
| | Program terlaksana sesuai rencana/target | 4.09 | Baik |
| Jumlah Rata-rata | | 4.01 | Baik |

Sumber : Hasil Olah Data Angket Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil rekapitulasi dimensi produktivitas diperoleh hasil 4.01 yang masuk kedalam kategori baik. Tapi dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Satpol PP Kota Bogor, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, diperlukan personil yang banyak, sedangkan pada kenyataannya personil Satpol PP yang dilapangan masih terdapat beberapa kekurangan sehingga untuk melaksanakan tugasnya masih kurang maksimal khususnya dalam menangani masalah penertiban seperti PKL dan lain-lain. Oleh karena itu perlunya perbaikan terkait sumber daya manusia yang terlibat karena akan mempengaruhi tingkat

efisiensi dan efektivitas kinerja Satpol PP Kota Bogor.

Tabel 3
Rekapitulasi Jawaban Responden
Tentang Dimensi Produktivitas

| Dimensi | Indikator | M | Hasil Penafsiran |
|-------------------------|---|-------------|------------------|
| Kualitas Layanan | Layanan penertiban | 4.08 | Baik |
| | Petugas tidak dibebani oleh tugas-tugas lain | 4.04 | Baik |
| | Komunikasi yang terjalin antara petugas dengan masyarakat | 4.21 | Sangat Baik |
| | Koordinasi yang terjalin antara petugas dengan masyarakat | 4.21 | Sangat Baik |
| Jumlah Rata-rata | | 4.01 | Baik |

Sumber : Hasil Olah Data Angket Penelitian, 2019

Kualitas layanan menjadi salah satu factor penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi atau instansi khususnya di Dinas Satpol PP Kota Bogor, karena sebagai pelayan public harus bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan. Dari hasil rekapitulasi dimensi kualitas layanan diperoleh hasil 4.01 dengan kriteria baik. Walaupun indikator tersebut berada pada kriteria baik, namun dalam menjalankan setiap tugasnya Satpol PP Kota Bogor tetap harus tetap melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan agar mencapai hasil yang maksimal.

Tabel 4
Rekapitulasi Jawaban Responden
Tentang Dimensi Responsivitas

| Dimensi | Indikator | M | Hasil Penafsiran |
|-------------------------|--|-------------|---------------------|
| Responsivitas | Pemahaman terhadap visi misi dalam menjalankan program | 4.18 | Baik |
| | Pemberian layanan kepada masyarakat Maksimal | 4.18 | Baik |
| | Kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat | 4.13 | Baik |
| Jumlah Rata-rata | | 4.16 | Baik |

Sumber : Hasil Olah Data Angket Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi responsivitas memperoleh hasil 4.16 dengan kriteria penilaian baik. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Pegawai Satpol PP Kota Bogor yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya pengenalan Satpol PP kepada masyarakat, agar mengubah persepsi masyarakat terhadap Satpol PP yang dinilai hanya gusur menggusur, maka terkait hal itu Satpol PP khususnya Satpol PP Kota Bogor sebagai salah satu ujung tombak di pemerintahan, dengan menampung aspirasi masyarakat terlebih untuk menyampaikan hal-hal terkait penerapan Perda di Kota Bogor kepada masyarakat. Ketika ada pembangunan di suatu daerah yang melanggar aturan, maka pihak Satpol PP akan melakukan pemberitahuan atau sosialisasi agar tidak terjadi penggusuran dan sanksi-sanksi.

Tabel 5
Rekapitulasi Jawaban Responden
Tentang Dimensi Responsibilitas

| Dimensi | Indikator | M | Hasil Penafsiran |
|-------------------------|--|-------------|---------------------|
| Responsibilitas | Keadilan yang diberikan dalam melakukan sanksi/hukuman | 4.08 | Baik |
| | Masyarakat ikut berpartisipasi menangani permasalahan | 4.08 | Baik |
| | Pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan | 4.33 | Sangat Baik |
| Jumlah Rata-rata | | 4.16 | Baik |

Sumber : Hasil Olah Data Angket Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi responsibilitas hasil rekapitulasinya memperoleh nilai 4.16 dengan kriteria penilaian baik. dari hasil rekapitulasi diatas indikator mengenai keadilan dalam memberikan sanksi/hukuman kepada masyarakat yang melanggar. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Satpol PP Kota Bogor dalam menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan menjaga ketentraman masyarakat, memberikan tindakan administrative berupa pemberian surat permohonan, surat teguran dan menindak yang melakukan pelanggaran pada untuk diproses melalui peradilan yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Dan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP maka diperlukan partisipasi dari semua pihak, sama halnya dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan persoalan yang harus diselesaikan yang harus diselesaikan bersama. Maka diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, dengan para PKL, dan masyarakat.

Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan membicarakan setiap persoalan PKL dengan penjelasan mengenai bagaimana cara penataan dan pengaturan tempat PKL di setiap wilayah, sehingga mampu menunjang perekonomian masyarakat.

Tabel 6
Rekapitulasi Jawaban Responden
Tentang Dimensi Akuntabilitas

| Dimensi | Indikator | M | Hasil Penafsiran |
|-------------------------|---|-------------|--------------------|
| Akuntabilitas | Pertanggung jawaban dalam mengimplementasikan kebijakan | 4.25 | Sangat Baik |
| | Pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah | 4.14 | Baik |
| | Pertanggung jawaban kepada masyarakat | 4.29 | Sangat Baik |
| Jumlah Rata-rata | | 4.22 | Sangat Baik |

Sumber : Hasil Olah Data Angket Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi akuntabilitas memperoleh nilai 4.22 dengan kriteria penilaian sangat baik. sesuai dengan hasil evaluasi program kegiatan selama satu tahun yang di pertanggungjawabkan dengan dibuatnya LKPJ dan LAKIP, dari hasil capaiannya dikatakan baik tetapi masih ada kekurangan, sehingga belum mencapai hasil target yang maksimal. Maka dari itu perlu adanya peningkatan mengenai pertanggung jawaban Satpol PP Kota Bogor kepada pemerintah daerah agar dapat mencapai hasil yang lebih maksimal.

Tabel 7
Rekapitulasi Keseluruhan Hasil
Kinerja Organisasi

| Variabel | Dimensi | M | Hasil Penafsiran |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Kinerja Organisasi | Produktivitas | 4.01 | Sangat Baik |
| | Kualitas Layanan | 4.13 | Baik |
| | Responsivitas | 4.26 | Sangat Baik |
| | Responsibilitas | 4.16 | Baik |
| | Akuntabilitas | 4.22 | Sangat Baik |
| Jumlah Rata-rata | | 4.13 | Baik |

Sumber : Hasil Olah Data Angket Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas kinerja organisasi di Dinas Satpol PP Kota Bogor dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 75 orang pegawai Satpol PP Kota Bogor menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi mengenai variabel kinerja organisasi di Dinas Satpol PP Kota Bogor memperoleh angka rata-rata sebesar **4.13** dengan kriteria penilaian **baik**. untuk dimensi responsivitas memperoleh nilai tinggi dengan angka penafsiran sebesar 4.26 yang masuk dalam kriteria penilaian sangat baik.

Sedangkan untuk skor terendah itu terdapat pada indikator produktivitas, yaitu terdapat pada dimensi sumber daya manusia yang terlibat dengan nilai yang diperoleh sebesar 3.8 yang termasuk dalam kategori baik. meskipun kinerja organisasi dari dimensi produktivitas Satpol PP Kota Bogor sudah dinilai baik, namun pada kenyataannya masih ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi, karena dalam pelaksanaannya bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Satpol PP

Kota Bogor masih belum memadai. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja setiap pegawai ketika akan melaksanakan tugasnya baik dilingkungan internal maupun eksternal, sehingga akan berdampak pada hasil capaian kinerja di Dinas Satpol PP Kota Bogor.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada Bab IV penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Organisasi yang telah dilaksanakan oleh pegawai Dinas Satpol PP Kota Bogor, jika dilihat dari rekapitulasi seluruh dimensi memperoleh hasil 4.13 yang termasuk kedalam kriteria penilaian baik. walaupun berada pada kategori baik akan tetapi masih terjadi hambatan dalam melaksanakan tugasnya dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Satpol PP Kota Bogor belum memadai dalam menangani ketertiban, kemananan dan ketentraman di lingkungan kota bogor dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi dalam melaksanakan tugasnya ketika berada di lapangan. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dan efesiensi dalam melaksanakan tugas, maka dari itu perlunya peningkatan agar hasil capaian kinerja Dinas Satpol PP Kota Bogor dapat meningkat.

IMPLIKASI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Agus Dwiyanto (2008:49), yaitu yang terdiri dari dimensi

produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Alasan penulis menggunakan teori tersebut agar dapat mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja organisasi Dinas Satpol PP Kota Bogor dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dilingkungan masyarakat dan seperti apa pertanggungjawaban dari Satpol PP Kota Bogor dalam melaksanakan Perda yang diperintahkan oleh Kepala Daerah.

Implikasi praktis dari adanya analisis penilaian kinerja organisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja organisasi di Dinas Satpol PP Kota Bogor, apabila kinerja organisasinya sudah baik maka kebijakan pemerintah terkait ketertiban, keamanan dan ketentraman akan bernilai positif dikalangan masyarakat, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Halawi, Dea Siti H. Dkk. 2016. *Analisis Kinerja Pegawai Bidang Pengendalian dan Penertiban (DALTI) Pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Bogor*. Jurnal Governansi ISSN 2442-3971 Vol 2 Nomor 1, April 2016.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Dokumen-dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satpol PP Kota Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum

keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/135/M.PAN/9/ 2004 tentang pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pedoman Evaluasi untuk mengukur keberhasilan suatu program kegiatan.